



The Analysis of Financing in the Agricultural, Forestry, and Agricultural Infrastructure Sectors in BPRS in Indonesia

**Cut Maza Safira¹, Leli Putri Ansari*², Okta Rabiana Risma³ Dian Ariani⁴
Noval Suhendra⁵**

* leliputriansari@utu.ac.id

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teuku Umar

ABSTRACT

The agriculture, forestry, and agricultural infrastructure sector plays a crucial role in maintaining Indonesia's food security, yet it continues to face various challenges, especially in terms of limited access to financing. Sharia Rural Banks (BPRS) are among the financial institutions that have the capacity to provide funding to this sector, although the distribution of such financing is affected by both internal and external factors. This study aims to analyze the influence of Non-Performing Financing (NPF), Third Party Funds (DPK), and the Farmer Exchange Rate (NTP) on BPRS financing in the agriculture, forestry, and agricultural infrastructure sectors in Indonesia. Using monthly time series data from January 2013 to September 2024, the study applies the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach to explore both short-run and long-run relationships. The findings indicate that NPF has a negative and statistically significant effect in both the short and long term. DPK, while showing an insignificant effect in the short term negative in the previous period and positive in the current exhibits a significant and positive influence over the long term. Meanwhile, NTP exerts a positive but statistically insignificant impact across both time horizons. These results provide important insights into the variables affecting BPRS financing and offer useful input for policy development aimed at strengthening the targeted sectors through Islamic financial approaches.

Kata Kunci: agricultural sector; farmer exchange rate; financing; non performing financing; third party funds

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus dijuluki negara agraris dengan wilayah pertaniannya yang subur dan juga luas sehingga membuat mayoritas penduduknya berperan sebagai petani. Sektor ini berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Namun meskipun demikian sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut Alam *et al.*, (2022) permasalahan modal menjadi tantangan yang cukup besar bagi para petani, akibatnya banyak para petani kesulitan mengembangkan usaha pertaniannya dan hidup dalam kemiskinan. Wicaksono & Fitriyani, (2020) menyatakan bahwa porsi pembiayaan bank yang dialokasikan untuk kegiatan pertanian, kehutanan dan sarana penunjangnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan industri, perdagangan, barang, dan jasa lainnya yang mengalami peningkatan keuntungan yang cepat.



Lembangan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki potensi besar sebagai alternatif pembiayaan, terutama bagi petani, karena keberadaannya yang dekat dengan masyarakat dan mampu menjangkau wilayah pedesaan yang sering tidak dijangkau oleh bank umum (Essa et al., 2022). Dengan berlandaskan prinsip syariah, BPRS tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mengedepankan keadilan dan manfaat sosial. Lembaga ini bertujuan memberikan akses pembiayaan kepada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang terbatas, termasuk pelaku usaha berskala kecil dan mikro, baik di desa maupun kota, yang sering terkendala untuk mengakses pembiayaan dari bank umum. Salah satu fungsi penting BPRS adalah menyalurkan dana guna mendukung pertumbuhan sektor riil, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Melalui skema pembiayaan yang inklusif dan sesuai prinsip syariah, BPRS diharapkan mampu berkontribusi dalam pembiayaan sektor strategis seperti pertanian, kehutanan, dan sarana pendukung pertanian, guna memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan.

Distribusi pembiayaan pada sektor pertanian, kehutanan, serta prasarana pendukungnya dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yakni eksternal dan internal. Faktor eksternal faktor yang mencakup unsur – unsur yang tidak berada dalam kendali bank seperti Nilai Tukar Petani (NTP) yang menunjukkan kesejahteraan serta kemampuan beli petani terhadap barang konsumsi dan produksi. NTP yang tinggi menunjukkan kondisi ekonomi petani yang baik dan dapat mendorong peningkatan permintaan pembiayaan. Sementara itu, faktor internal berasal dari dalam bank itu sendiri, yang meliputi *Non Performing Financing* (NPF) sebagai cerminan tingkat risiko pembiayaan yang berpotensi bermasalah, serta Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikumpulkan dan berfungsi sebagai sumber pendanaan utama (Alam et al., 2022). Kedua faktor ini perlu diperhatikan secara seimbang agar BPRS dapat menjalankan perannya secara efektif dalam mendukung sektor strategis, terutama sektor pertanian.

Berbagai studi sebelumnya telah meneliti berbagai determinan yang berpengaruh terhadap proses penyaluran pembiayaan pada BPRS. Sanjaya & Nasrah (2024) menemukan bahwa peningkatan rasio NPF berkorelasi dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan. Hal ini disebabkan oleh tingginya risiko pembiayaan bermasalah yang ditunjukkan oleh NPF, sehingga lembaga keuangan cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana karena adanya kewajiban membentuk pencadangan atas potensi kerugian. Di sisi lain, Alam et al. (2022) menunjukkan bahwa semakin tinggi volume Dana Pihak Ketiga yang diperoleh, maka semakin besar pula peluang bank dalam menyediakan pembiayaan, khususnya di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara DPK dan kapasitas. Sementara itu, Essa et al. (2022) menyatakan bahwa NTP yang digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai tingkat kesejahteraan yang dialami oleh petani juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan sektor pertanian, sebab NTP yang tinggi menunjukkan petani dalam kondisi ekonomi yang baik dan layak untuk menerima pembiayaan. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji pembiayaan sektor pertanian, kehutanan, dan sarana pertanian oleh BPRS, sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang lebih terfokus.

Kesenjangan riset terlihat dari masih sedikitnya studi yang secara menyeluruh meneliti pengaruh variabel internal seperti rasio pembiayaan bermasalah (NPF) dan dana yang dihimpun dari masyarakat (DPK), serta faktor eksternal berupa indikator kesejahteraan petani (NTP), terhadap pendanaan sektor pertanian, kehutanan, dan sarana penunjangnya oleh lembaga keuangan syariah skala mikro seperti BPRS. Padahal, ketiganya berperan penting dalam menentukan kapasitas dan kebijakan pembiayaan bank. Selain itu, mayoritas penelitian sebelumnya menggunakan metode regresi linier seperti OLS yang hanya menangkap hubungan

statis, tanpa mengkaji dinamika hubungan jangka pendek dan panjang secara simultan, padahal hal ini penting dalam analisis data time series dan penyesuaian struktural pembiayaan sektor strategis.

Merujuk pada latar belakang tersebut, studi ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana pengaruh rasio pembiayaan bermasalah (NPF), jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), serta Nilai Tukar Petani (NTP) terhadap alokasi pembiayaan pada sektor pertanian, kehutanan, dan sarana penunjangnya oleh BPRS di Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder berkala bulanan dari Januari 2013 hingga September 2024, yang memberikan gambaran menyeluruh terhadap dinamika antarvariabel. Untuk menguji hubungan tersebut, digunakan pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL), yang memungkinkan eksplorasi keterkaitan dalam jangka pendek maupun panjang meski antar variabel memiliki tingkat integrasi berbeda. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus sektoral yang lebih spesifik, cakupan data yang luas, serta penerapan model ARDL yang masih jarang digunakan dalam studi sejenis, sehingga hasilnya diharapkan memberikan wawasan yang lebih mendalam dan relevan sebagai masukan bagi pengembangan kebijakan pembiayaan syariah di sektor strategis.

METODE PENELITIAN

Studi ini memakai pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder dalam bentuk deret waktu (time series) bulanan mulai dari Januari 2013 hingga September 2024, yang terdiri atas 141 titik observasi. Data dikumpulkan dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), guna menjamin keakuratan serta keandalan informasi yang dianalisis. Fokus analisis diarahkan pada pembiayaan yang disalurkan BPRS di Indonesia terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan sarana pendukungnya, yang berperan sebagai variabel terikat. Sementara itu, variabel bebas terdiri dari rasio pembiayaan bermasalah (NPF) sebagai cerminan kualitas portofolio pembiayaan, serta Dana Pihak Ketiga (DPK) yang menggambarkan kapasitas perbankan dalam menghimpun dana, serta Nilai Tukar Petani (NTP) yang merefleksikan kesejahteraan petani. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman menyeluruh mengenai keterkaitan antar variabel dalam mendukung pembiayaan pada sektor-sektor prioritas.

Dalam kajian ini, digunakan metode ekonometrika berupa Autoregressive Distributed Lag (ARDL) yang menggabungkan konsep Autoregressive (AR), yang mempertimbangkan pengaruh nilai masa lalu variabel dependen, dan Distributed Lag (DL), yang memasukkan pengaruh lag dari variabel independen. ARDL mengasumsikan bahwa suatu variabel dipengaruhi oleh nilai historisnya sendiri serta oleh variabel lain di periode sebelumnya (Jumhur, 2020). Model ini unggul karena dapat digunakan untuk data dengan tingkat integrasi berbeda (I(0) atau I(1)) dan mampu mengidentifikasi hubungan jangka pendek dan jangka panjang secara bersamaan tanpa perlu transformasi data yang kompleks. Oleh sebab itu, ARDL menjadi metode yang sesuai untuk menganalisis hubungan antara NPF, DPK, dan NTP terhadap penyaluran dana oleh BPRS dalam mendukung sektor agraris, kehutanan, serta infrastruktur pendukungnya (Kong et al., 2021).

Sebelum melakukan estimasi model ARDL perlu dilakukan tahapan uji diagnostik untuk memastikan model yang digunakan tidak melanggar asumsi dasar dalam analisis ekonometrika. Uji diagnostik tersebut meliputi uji stasioneritas, dan uji kointegrasi dengan pendekatan *bound test* dan uji lag optimum.

Model umum ARDL secara matematis dapat dirumuskan melalui persamaan berikut :

$$\Delta Y_t = \gamma_0 + \sum_{i=1}^n \gamma_1 \Delta Y_{t-i} + \sum_{i=0}^n \gamma_2 \Delta X_{1t-i} + \sum_{i=0}^n \gamma_3 \Delta X_{2t-i} + \sum_{i=0}^n \gamma_4 \Delta X_{3t-i} +$$

$$\theta_1 Y_{t-1} + \theta_2 X_{1t-1} + \theta_3 X_{2t-1} + \theta_4 X_{3t-1} + \varepsilon_t \dots\dots\dots(3.1)$$

Selanjutnya persamaan 3.1 dilakukan transformasi logaritma natural (ln) untuk menyeragamkan satuan variabel sehingga diperoleh model semi logaritma, persamaannya sebagai berikut :

$$\Delta LNY_t = \gamma_0 + \sum_{i=1}^n \gamma_1 \Delta LNY_{t-i} + \sum_{i=0}^n \gamma_2 \Delta X_{1t-i} + \sum_{i=0}^n \gamma_3 \Delta LNX_{2t-i} + \sum_{i=0}^n \gamma_4 \Delta X_{3t-i} + \theta_1 LNY_{t-1} + \theta_2 X_{1t-1} + \theta_3 LNX_{2t-1} + \theta_4 X_{3t-1} + \varepsilon_t \dots\dots\dots(3.2)$$

Adapun model ARDL yang digunakan dalam penelitian ini, yang telah disesuaikan dengan variabel-variabel yang diteliti, dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$\Delta LNPBSP_t = \gamma_0 + \sum_{i=1}^n \gamma_1 \Delta LNPBSP_{t-i} + \sum_{i=0}^n \gamma_2 \Delta NPF_{t-i} + \sum_{i=0}^n \gamma_3 \Delta LNDPK_{t-i} + \sum_{i=0}^n \gamma_4 \Delta NTP_{t-i} + \theta_1 LNPBSP_{t-1} + \theta_2 NPF_{t-1} + \theta_3 LNDPK_{t-1} + \theta_4 NTP_{t-1} + \varepsilon_t \dots\dots\dots(3.4)$$

Dimana :

LNPBSP = Pembiayaan Sektor Pertanian, kehutanan dan sarana pertanian pada BPRS di Indonesia

NPF = Non Performing Financing

LNDPK = Dana Pihak Ketiga

NTP = Nilai Tukar Petani

$\gamma_{1,2,3,4}$ = Koefisien Jangka Pendek

$\theta_{1,2,3,4}$ = Koefisien Jangka Panjang

ε_t = Error Term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Stasioneritas

Penelitian ini menggunakan uji akar unit (unit root test) untuk menentukan apakah data bersifat stasioner atau mengalami tren dari waktu ke waktu. Pengujian ini penting guna menjamin validitas model dalam analisis deret waktu. Metode yang diterapkan adalah Augmented Dickey-Fuller (ADF) yang dikembangkan oleh Dickey dan Fuller, dengan mempertimbangkan lag tambahan untuk mengatasi autokorelasi, sehingga meningkatkan akurasi hasil pengujian.

Tabel 1. Hasil Uji Stasioneritas

| Variabel | Augmented Dickey Fuller (At Level) | | | Augmented Dickey Fuller (First Diff) | | |
|-------------------|------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|
| | ADF | T-Critis | Prob | ADF | T-Critis | Prob |
| NPF (X1) | -5.32268 | -2.88228 | 0.0000** | -9.75388 | -2.88375 | 0.0000** |
| LNDPK (X2) | -0.81782 | -2.88259 | 0.8106 | -10.8153 | -2.88259 | 0.0000** |
| NTP (X3) | -1.44651 | -2.88213 | 0.5578 | -11.2221 | -2.88228 | 0.0000** |
| LNPBSP (Y) | -4.05117 | -2.88228 | 0.0016** | -8.7896 | -2.88375 | 0.0000** |

Catatan : **Signifikan pada 5 persen
 Sumber : Eviews (data diolah Mei 2025)



Berdasarkan pada Tabel 1 diketahui bahwa masing – masing variabel penelitian ini menunjukkan tingkat stasioner yang berbeda. Dua variabel yaitu NPF dan PBSP terbukti stasioner pada *at level*, Sementara itu, dua variabel lainnya, yakni DPK dan NTP, menunjukkan stasioneritas pada tingkat diferensiasi pertama. Dengan kondisi di mana sebagian variabel sudah stasioner di level dan sebagian lainnya pada first difference, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi guna mengidentifikasi adanya hubungan jangka panjang di antara variabel-variabel yang dianalisis.

Uji Kointegrasi

Sebelum melakukan estimasi model ARDL, perlu dilakukan pengujian kointegrasi guna memastikan adanya hubungan jangka panjang antar variabel. Penelitian ini menggunakan uji batas (bound test), yang cocok diterapkan karena mampu mengidentifikasi keseimbangan jangka panjang meskipun tingkat integrasi variabel berbeda, baik I(0) maupun I(1).

Tabel 2. Hasil Uji Kointegrasi

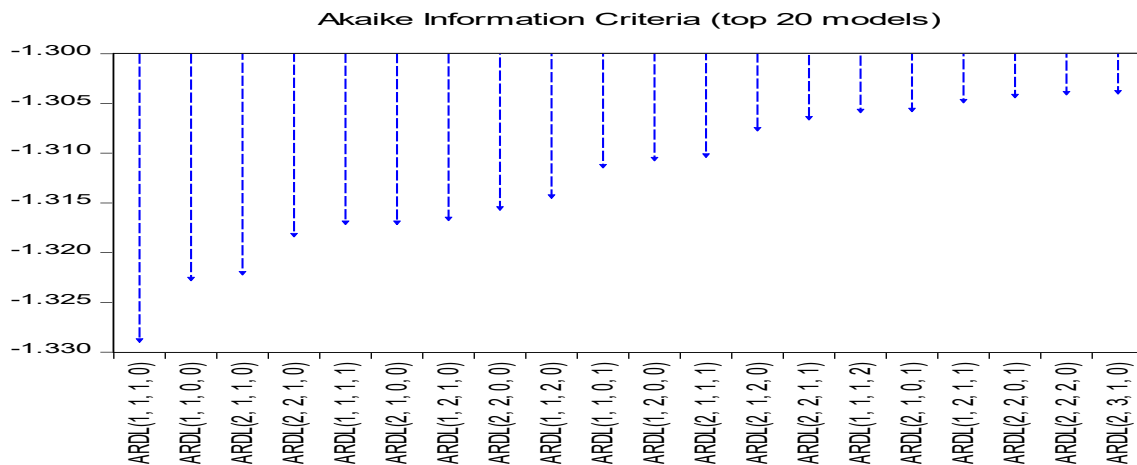
| F-Bounds Test | | Null Hypothesis: No levels relationship | | |
|----------------|----------|---|-----------------------|------|
| Test Statistic | Value | Signif. | I(0) | I(1) |
| | | | Asymptotic: n=1000 | |
| F-statistic | 3.721118 | 10% | 2.37 | 3.2 |
| k | 3 | 5% | 2.79 | 3.67 |
| | | 2.5% | 3.15 | 4.08 |
| | | 1% | 3.65 | 4.66 |

Sumber : Eviews (data diolah Mei 2025)

Merujuk pada Tabel 2, nilai F-statistik sebesar 3,72 tercatat lebih tinggi dibandingkan nilai batas bawah (2,79) dan batas atas (3,67) pada tingkat signifikansi 5 persen. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan kointegrasi, yang menandakan keterkaitan jangka panjang antara variabel NPF, DPK, dan NTP terhadap pendanaan yang disalurkan BPRS di Indonesia untuk sektor agrikultur, kehutanan, serta fasilitas pendukungnya. Artinya, perubahan pada ketiga variabel independen tersebut secara simultan memengaruhi pembiayaan sektor strategis tersebut dalam jangka panjang.

Penentuan Lag Optimum

Langkah awal sebelum mengestimasi model ARDL adalah menentukan jumlah lag yang optimal, yang dalam penelitian ini ditentukan dengan merujuk pada kriteria Akaike (AIC). Tujuan dari pemilihan lag ini adalah untuk mengetahui jumlah keterlambatan yang paling sesuai agar masing-masing variabel dapat memengaruhi variabel lain secara tepat dan efisien. Menurut Nulhanuddin & Andriyani (2020) serta Serdawati (2018), penentuan lag yang akurat penting guna meningkatkan keandalan estimasi model dan menghindari bias, seperti hilangnya informasi atau munculnya autokorelasi. Oleh karena itu, tahap ini menjadi dasar penting dalam membangun model ARDL yang valid dan mampu mengidentifikasi hubungan jangka pendek dan panjang antar variabel..



Gambar 1. Model Terbaik

Berdasarkan Gambar 1 model ARDL yang paling optimal adalah ARDL (1, 1, 1, 0). Pemilihan model ini didasarkan pada nilai AIC yang paling rendah dibandingkan dengan alternatif model lainnya.

Estimasi ARDL Jangka Pendek

Tabel 3. Hasil Estimasi ARDL Jangka Pendek

| Conditional Error Correction Regression | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|--------|
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
| C | 4.707706 | 1.268177 | 3.712185 | 0.0003 |
| LNPBSP(-1)* | -0.238369 | 0.057620 | -4.136916 | 0.0001 |
| NPF(-1) | -0.005194 | 0.001575 | -3.298032 | 0.0012 |
| LNDPK(-1) | 0.057397 | 0.031997 | 1.793857 | 0.0751 |
| NTP** | 0.000366 | 0.001869 | 0.195603 | 0.8452 |
| D(NPF) | -0.022988 | 0.000706 | -32.58020 | 0.0000 |
| D(LNDPK) | -0.144045 | 0.124000 | -1.161649 | 0.2475 |

Sumber : Eviews (data diolah April 2025)

Hasil estimasi jangka pendek model ARDL yang ditampilkan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai koefisien NPF lag satu adalah -0,005194 dengan tingkat probabilitas 0,0012, yang lebih kecil dari ambang signifikansi 5%. Sementara itu, NPF saat ini memiliki koefisien -0,022988 dengan signifikansi 0,0000, yang juga signifikan secara statistik. Temuan ini mengisyaratkan bahwa dalam jangka pendek, baik nilai NPF sebelumnya maupun saat ini memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pendanaan oleh BPRS pada sektor agrikultur, kehutanan, serta sarana penunjangnya.

Nilai koefisien DPK lag satu tercatat sebesar 0,057397 dengan tingkat signifikansi 0,0751, yang berarti melebihi ambang signifikansi 5%. Pada periode saat ini, koefisien DPK menunjukkan angka -0,144045 dengan nilai probabilitas 0,2475. Dengan demikian, dalam jangka pendek, DPK periode sebelumnya menunjukkan pengaruh positif yang tidak signifikan,



sedangkan pada periode berjalan justru berdampak negatif dan tetap tidak signifikan terhadap penyaluran dana oleh BPRS untuk sektor agrikultur, kehutanan, dan fasilitas pendukungnya.

Pada periode saat ini, koefisien NTP tercatat sebesar 0,000366 dengan signifikansi mencapai 0,8452, yang menunjukkan bahwa nilainya jauh di atas batas signifikansi 5%. Dengan demikian, meskipun hubungan antara NTP dan penyaluran dana oleh BPRS untuk sektor agrikultur dan elemen pendukungnya bersifat positif dalam jangka pendek, pengaruh tersebut tidak memiliki signifikansi secara statistik.

Estimasi ARDL Jangka Panjang

Tabel 4. Hasil Estimasi ARDL Jangka Panjang

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| NPF | -0.021791 | 0.004173 | -5.221836 | 0.0000 |
| LNDPK | 0.240792 | 0.112847 | 2.133794 | 0.0347 |
| NTP | 0.001534 | 0.007904 | 0.194012 | 0.8465 |
| C | 19.74964 | 2.942186 | 6.712572 | 0.0000 |

Sumber : Eviews (data diolah April 2025)

Hasil estimasi jangka panjang menunjukkan bahwa NPF memiliki dampak negatif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan BPRS di sektor agrikultur dan sektor terkait, dengan koefisien $-0,021791$ dan nilai probabilitas $0,0000$ ($p < 0,05$).

DPK menunjukkan koefisien positif sebesar $0,240792$ dengan nilai p sebesar $0,0347$ ($p < 0,05$), yang mengindikasikan adanya pengaruh positif signifikan terhadap penyaluran dana BPRS di sektor agrikultur dan sektor terkait dalam jangka panjang.

Variabel Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan koefisien regresi sebesar $0,001534$ dengan probabilitas $0,8465$. Karena nilai ini jauh melebihi tingkat signifikansi 5% ($0,8465 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa meskipun NTP berpengaruh positif terhadap pembiayaan sektor pertanian, kehutanan, dan sarana pertanian di BPRS, pengaruh tersebut tidak signifikan dalam jangka panjang.

Koefisien regresi NTP sebesar $0,001534$ dengan p -value $0,8465$ ($p > 0,05$) menunjukkan bahwa meskipun berdampak positif, pengaruh NTP terhadap pembiayaan BPRS di sektor agrikultur dan sektor terkait tidak signifikan dalam jangka panjang.

Pembahasan

Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan Sektor Pertanian Kehutanan dan Sarana Pertanian Pada BPRS di Indonesia

Secara jangka pendek, NPF baik pada periode berjalan maupun sebelumnya berdampak negatif signifikan terhadap pembiayaan BPRS untuk sektor agrikultur dan sektor terkait. Kenaikan NPF mencerminkan tingginya pembiayaan bermasalah, yang mendorong BPRS mengalokasikan cadangan dana untuk menutup potensi kerugian, sehingga ruang untuk menyalurkan pembiayaan baru menjadi terbatas.

Dalam periode jangka panjang, rasio NPF menunjukkan dampak negatif yang signifikan terhadap penyaluran dana BPRS untuk sektor agrikultur dan sektor terkait di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa tingginya pembiayaan bermasalah dapat mengganggu kestabilan operasional dan memperlemah kondisi keuangan bank. Rasio NPF yang tinggi mencerminkan penurunan kualitas aset dan kesehatan bank, sehingga fungsi intermediasi BPRS menjadi kurang optimal. Pada kondisi demikian, BPRS biasanya bersikap lebih selektif dalam menyalurkan dana, khususnya ke sektor-sektor yang memiliki tingkat risiko tinggi seperti pertanian. Kondisi ini juga dapat menurunkan kepercayaan investor,

pemilik dana, dan nasabah terhadap BPRS, yang akhirnya membatasi akses pendanaan eksternal, mengurangi likuiditas, dan menurunkan kapasitas pembiayaan, termasuk pada sektor-sektor strategis tersebut.

Temuan ini sejalan dengan hasil studi Sanjaya, Rido Agil & Nasrah (2024) yang menemukan bahwa Non Performing Financing (NPF) berdampak negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Walaupun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berbeda, yaitu dengan model ARDL yang membedakan efek jangka pendek dan panjang, arah pengaruhnya tetap konsisten. Artinya, peningkatan NPF cenderung menghambat kemampuan BPRS dalam menyalurkan dana. Namun, hasil berbeda dilaporkan oleh Rohmatunnisa & Pratiwi (2020), yang mengindikasikan bahwa secara parsial, NPF justru berkontribusi positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Perbedaan ini bisa saja dipengaruhi oleh variasi konteks penelitian, jenis institusi keuangan, periode waktu analisis, atau metode yang digunakan, sehingga diperlukan kajian lanjutan untuk memahami hubungan tersebut secara lebih menyeluruh.

Pengaruh DPK Terhadap Pembiayaan Sektor Pertanian Kehutanan dan Sarana Pertanian Pada BPRS di Indonesia

Secara jangka pendek, DPK pada periode saat ini tercatat memiliki dampak negatif terhadap penyaluran pembiayaan sektor agrikultur dan sektor terkait oleh BPRS di, meskipun tidak signifikan secara statistik. Hal ini kemungkinan terjadi karena dana yang baru dihimpun belum langsung disalurkan, mengingat proses penyaluran membutuhkan waktu dan tahapan seperti seleksi kelayakan, analisis risiko, hingga pencairan. Sebaliknya, DPK pada periode sebelumnya menunjukkan dampak positif meskipun tetap tidak signifikan, yang mengindikasikan bahwa dana tersebut mulai dimanfaatkan untuk pembiayaan, namun belum memberikan pengaruh yang kuat. Dengan demikian, efek DPK baru terlihat secara bertahap dan belum sepenuhnya tercermin dalam periode jangka pendek akibat keterbatasan waktu dan proses internal.

Pada jangka waktu yang lebih panjang, DPK terbukti memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan BPRS ke sektor agrikultur serta sektor pendukung lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan DPK yang stabil mendukung peningkatan kapasitas BPRS dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif. DPK yang berperan sebagai sumber likuiditas utama berpengaruh besar terhadap kapasitas BPRS dalam menjalankan peran intermediasinya. Semakin tinggi dana yang berhasil dikumpulkan, maka semakin besar pula ruang gerak BPRS untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor strategis seperti pertanian, yang umumnya memerlukan dukungan pembiayaan jangka panjang dan musiman. Selain itu, ketersediaan DPK juga memungkinkan fleksibilitas dalam menyesuaikan skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, sehingga mendorong pertumbuhan produktivitas dan ketahanan ekonomi di tingkat lokal.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi Anggani & Nugroho (2021), yang menunjukkan bahwa penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki dampak yang signifikan dan bersifat positif terhadap pembiayaan BPRS dalam jangka panjang. Hal ini menguatkan peran penting DPK dalam menunjang fungsi intermediasi lembaga keuangan. Namun, hasil jangka pendek menunjukkan perbedaan. Jika dalam studi mereka pengaruh DPK juga signifikan secara positif dalam jangka pendek, maka dalam penelitian ini, baik pada periode berjalan maupun sebelumnya, belum ditemukan signifikansi. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh variasi data, periode analisis, atau kondisi ekonomi yang memengaruhi proses penyaluran dana. Sementara itu, temuan Darmawan (2022) juga memperkuat bukti bahwa DPK berdampak positif dan signifikan terhadap pembiayaan dalam kedua jangka waktu. Hal ini menegaskan bahwa meskipun arah pengaruh DPK cenderung

positif, tingkat signifikansinya dapat berbeda tergantung pada konteks dan pendekatan penelitian yang digunakan.

Walaupun penelitian ini menggunakan metode yang sama, yakni ARDL, perbedaan hasil yang muncul kemungkinan disebabkan oleh variasi periode penelitian, fokus sektor ekonomi, serta karakteristik masing-masing lembaga keuangan. Selain itu, kondisi makroekonomi yang tidak stabil seperti inflasi, suku bunga, dan ketahanan sistem keuangan—juga dapat memengaruhi lambatnya respons pembiayaan terhadap perubahan DPK dalam jangka pendek. Faktor eksternal lainnya, termasuk kebijakan moneter dan regulasi perbankan, turut memperlambat transmisi efek DPK terhadap penyaluran dana. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi jangka panjang dalam pengelolaan DPK oleh BPRS agar dampak positif terhadap pembiayaan dapat tercapai secara maksimal seiring waktu.

Pengaruh NTP Terhadap Pembiayaan Sektor Pertanian Kehutanan dan Sarana Pertanian Pada BPRS di Indonesia

Pada periode jangka pendek, Nilai Tukar Petani (NTP) memiliki korelasi positif terhadap penyaluran pembiayaan yang dilakukan BPRS pada sektor pertanian serta bidang kehutanan dan prasarana pendukungnya di Indonesia, meskipun belum signifikan secara statistik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan NTP, sebagai cerminan daya beli petani yang membaik, belum mampu secara langsung mendorong peningkatan pembiayaan. Kondisi tersebut dimungkinkan karena BPRS membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan ekonomi di sektor pertanian, termasuk proses analisis risiko dan kelayakan pembiayaan. Selain itu, kehati-hatian dalam kebijakan penyaluran dana serta tingginya risiko sektor pertanian turut memengaruhi lambatnya respons pembiayaan terhadap perbaikan NTP.

Untuk periode jangka panjang, Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) memiliki hubungan positif terhadap penyaluran pembiayaan oleh BPRS di sektor pertanian, kehutanan, dan fasilitas pendukungnya. Namun, secara statistik, hubungan tersebut belum menunjukkan signifikansi yang kuat. Temuan ini mengindikasikan meski peningkatan NTP mencerminkan perbaikan kesejahteraan petani, variabel ini belum menjadi faktor utama dalam keputusan pembiayaan BPRS. Keputusan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti risiko sektor, likuiditas, kebijakan bank, dan kondisi ekonomi makro. Dengan demikian, meskipun NTP mendukung kondisi ekonomi yang lebih baik, pengaruhnya terhadap pembiayaan belum cukup kuat tanpa dukungan faktor lain.

Penelitian ini sejalan dengan studi terdahulu yang menekankan pentingnya peran faktor internal dalam memengaruhi keputusan penyaluran pembiayaan. Arinda et al. (2022) mengungkapkan bahwa indikator internal seperti Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) memiliki dampak signifikan terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (NPF), sedangkan variabel eksternal seperti suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Karena NPF menggambarkan bagaimana BPRS mengelola risiko kredit, maka temuan ini memperkuat pandangan bahwa arah pembiayaan pada sektor pertanian, kehutanan, dan infrastruktur penunjangnya lebih banyak ditentukan oleh kinerja dan kebijakan internal bank, dibandingkan faktor eksternal seperti Nilai Tukar Petani (NTP). Hal ini menekankan pentingnya penguatan manajemen internal untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kinerja BPRS.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sudana & Asiyah (2018) dimana ROA, dan CAR memiliki dampak signifikan terhadap NPF, sedangkan faktor eksternal seperti inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak signifikan. Meskipun kedua penelitian tersebut tidak secara langsung meneliti penyaluran pembiayaan, hasilnya memberikan gambaran bahwa faktor-faktor internal bank memiliki pengaruh lebih dominan dalam menentukan kualitas pembiayaan, yang pada akhirnya juga akan memengaruhi keputusan BPRS dalam

menyalurkan pembiayaan.

Keterbatasan Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator makro perlu diperhatikan dalam analisis pembiayaan BPRS. Walaupun NTP mencerminkan kesejahteraan petani secara umum, indikator ini tidak menggambarkan kondisi individual petani sebagai nasabah BPRS. Hal ini menjelaskan mengapa pengaruh NTP terhadap pembiayaan tidak signifikan secara statistik, yang merupakan hasil yang dapat diterima secara akademik. Temuan ini mendorong riset lanjutan guna menelaah variabel lain yang mungkin lebih menentukan dalam pembiayaan sektor terkait oleh BPRS. Pendekatan ini diharapkan dapat membuat analisis pembiayaan lebih relevan dengan kondisi nyata dan meningkatkan efektivitas kebijakan pembiayaan BPRS.

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa Analisis menunjukkan bahwa NPF berkontribusi secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan sektor agrikultur dan kehutanan oleh BPRS, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang. Pada periode saat ini, Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan hubungan negatif terhadap pembiayaan, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik, sementara pada periode sebelumnya bersifat positif namun tetap tidak signifikan. Sementara itu, dalam analisis jangka panjang, Dana Pihak Ketiga (DPK) cenderung berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan, menandakan peran pentingnya dalam mendukung pembiayaan BPRS secara berkelanjutan. Sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan hubungan positif, meskipun tidak memiliki signifikansi secara, yang berarti meskipun NTP mencerminkan perbaikan kesejahteraan petani, dampaknya belum cukup kuat dalam memengaruhi pembiayaan. Temuan ini menguatkan bahwa keputusan pembiayaan BPRS lebih dipengaruhi oleh faktor internal seperti risiko pembiayaan dan rasio keuangan dibandingkan faktor eksternal seperti NTP. Keterbatasan NTP sebagai indikator makro yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi nasabah secara individu juga menjadi alasan kurangnya pengaruh signifikan variabel ini. Dengan demikian, untuk optimalisasi pembiayaan sektor tersebut, fokus perlu diberikan pada faktor internal bank dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menemukan variabel eksternal yang lebih relevan dengan kondisi nyata di lapangan.

BPRS diharapkan dapat terus menjaga kualitas pembiayaan dengan mengendalikan tingkat Non Performing Financing (NPF) secara efektif guna menghindari risiko pembiayaan bermasalah yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan. Penerapan manajemen risiko yang kuat dan evaluasi rutin terhadap pembiayaan menjadi langkah penting yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah juga diharapkan menyusun kebijakan yang mendukung kemudahan akses pembiayaan sektor pertanian, kehutanan, dan sarana pertanian, seperti melalui insentif fiskal, subsidi bunga, atau program penjaminan. Untuk penelitian berikutnya, disarankan mengeksplorasi variabel lain yang relevan seperti inflasi, suku bunga acuan, atau indikator internal bank, serta memperluas periode data dan menggunakan data terbaru agar hasil penelitian lebih akurat dan kontekstual dengan perkembangan ekonomi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A., Rusgianto, S., Hasmarini, I., & Farhan, M. (2022). The determinant of shariah financing in the agricultural sector: Evidence from Indonesia. *Journal of Asian Finance*, 9(4), 287–298. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no4.0287>
- Anggraini, A., & Nugroho, R. Y. Y. (2021). Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bank pembiayaan rakyat syariah. *Jurnal Iqtisaduna*, 7(1), 27–39. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/20420>



- Arinda, N., Setiawan, I., & Triuspitorini, F. A. (2022). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Non- Performing Financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(3), 480–490. <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i3.3026>
- Essa, S. P., Burhany, D. I., & Syarief, M. E. (2022). Analisis Pembiayaan Sektor Pertanian pada BPRS dengan Perspektif Kesejahteraan dan Risiko. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan*, 3(2), 104–114. <https://doi.org/10.51805/jmbk.v3i2.69>
- Darmawan, F. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada BPR dan BPRS di Indonesia. (Tesis, Universitas Islam Indonesia). UII Institutional Repository. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/43108>
- Jumhur, J. (2020). Penerapan autoregressive distributed lag dalam memodelkan pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan FDI terhadap pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9(3), 250–265. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jj/article/view/41332>
- Kong, Q., Peng, D., Ni, Y., Jiang, X., & Wang, Z. (2021). Trade openness and economic growth quality of China: Empirical analysis using ARDL model. *Finance Research Letters*, 38, 101488. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101488>
- Rohmatunnisa, H., & Pratiwi, L. N. (2020). Pengaruh NPF, FDR, CAR dan inflasi terhadap penyaluran pembiayaan modal kerja pada BPRS di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(1), 137–151. <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i1.2398>
- Sanjaya, R. A., & Nasrah, H. (2024). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Variabel Moderasi Murabahah Pada BPRS Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (JEIS)*, 3(1), 69 – 80. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/JEIS/article/download/1257/341/4217>
- Sudana, I. M., & Asiyah, A. S. (2018). Pengaruh faktor internal dan, eksternal terhadap risiko kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.31843/jmbi.v6i1.179>
- Wicaksono, S. A., & Fitriyani, Y. (2020). Analysis of factor affecting Islamic commercial bank financing for the agricultural sector in Indonesia. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 2(2), 123–137. <https://doi.org/10.20885/ajim.vol2.iss2.art5>